

# Dilema Peran Profetis dan Politik PGI

*Oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D*

Dibawah terang tema “Tuhan Mengangkat Kita dari Samudera Raya” (bdk. Mazmur 71:20), PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) yang mewadahi 90 lebih denominasi gereja, melakukan Sidang Raya keenambelasnya di Gunung Sitoli, Nias pada 11-17 November 2014. Pilihan tempat dan tema, seolah ingin menegaskan PGI sedang dalam situasi kontemplatif dan memberi makna terdalam arti tsunami dan bencana gempa yang melumpuhkan, roda perekonomian pulau tersebut 10 tahun silam. Bahkan penetapan empat noktah persoalan besar bangsa ini yaitu kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan, menjadi sub tema yang dipercekapkan secara intens, memperteguh pemaknaan tersebut. Pada tataran praktikal, tentu pelibatan diri sebagai *‘problem solver’* masalah kronis bangsa ini, PGI patut diapresiasi. Sekecil apapun kontribusi yang bisa diberikan. Dalam konteks ini, tugas diakonos gerejawi menjadi titik singgung yang bisa mempertemukan dua kutub pelayanan aksi teologis dan aksi sosial. Pertanyaannya, seberapa besarkah organisasi kemasyarakatan keagamaan sekelas PGI memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi *‘trigger’* pemecah persoalan bangsa yang sudah akut ini?

## Dimensi Profetis

Tugas utama rasul (*apostolos*) maupun penginjil (*euangelistes*) adalah memberitakan Injil (*euangelion*) Kristus bagi pertobatan mereka yang belum percaya dan bagi pertumbuhan umat percaya (Chamblin, 2006). Bila diartikan lebih jauh, gereja baik sebagai institusi keagamaan ataupun persekutuan orang percaya pada dasarnya adalah kepanjangan tangan menuntaskan pekerjaan rumah para *apostolos* dan *euangelistes* tersebut. Tugas yang tidak ringan tetapi harus dilaksanakan dalam bayang-bayang tanggung-jawan iman.

Maka tidak heran bila isu kemiskinan yang pernah dipercekapkan pada Sidang Raya ke-11 di Surabaya tahun 1989 silam, kembali diapungkan ke permukaan. Itu artinya, sebagai sebuah perserikatan gereja-gereja, tugas berat yang diemban PGI untuk mengentaskan atau paling tidak mereduksi derajat kemiskinan umat, masih begitu sulit. Umat didera kemiskinan multi dimensi. Miskin secara sosial, miskin secara budaya, miskin secara moral, miskin secara politik terlebih miskin secara ekonomi.

Tidak elok rasanya jika semua atribut kemiskinan itu dilimpahkan kepada institusi gereja sebagai pihak yang paling bertanggungjawab. Kita ambil contoh kemiskinan secara ekonomi dengan skor indikator yang jelas. Orang dikatakan miskin, bila pola konsumsinya hanya mampu membelanjakan uang kurang dari 1 US dollar per hari atau versi BPS kurang dari 300 ribu rupiah per bulan. Mereka hidup bukan sekedar ingin survive tetapi memang benar-benar dalam level subsisten. Tidak bisa berbuat lebih dari apa yang mereka bisa kerjakan dan hasilkan.

Jumlah umat dengan karakteristik seperti itu bukan ribuan atau ratusan ribu mungkin saja jutaan. Bila mengacu data kemiskinan BPS (2014) jumlah mereka mencapai 28,28 juta orang. Jika 17-an juta lebih berada di pedesaan, maka tentu dapat ditafsir berapa jumlah umat Kristen yang juga tergolong miskin, sebab mayoritas gereja juga berada di desa. Maka bila hitungan kasar orang Kristen ada 10% (tidak termasuk Katolik) dan 10%-nya termasuk kategori tersebut, pekerjaan rumah gerejapun tidak ringan. Kondisi ini perlu dipecahkan, agar memberitakan kabar keselamatan bukan misi yang selalu dicurigai tetapi diapresiasi. Seruan profetis, tidak hanya kelantangan tentang tawaran situasi sejahtera yang imajinatif dimasa nanti, tetapi umatpun lebih hormat jika contoh praktisnya turut pula dirasakan dikefanaan hidup ini.

## **Dimensi Politik**

Ironisnya, ternyata selain kemiskinan, persoalan berat yang dihadapi bangsa ini adalah radikalisme, ketidakadilan dan lingkungan hidup yang secara serempak mengepung dari seluruh sisi. Mengulang pertanyaan di awal tulisan ini adakah gereja memiliki kesanggupan daya dan dana melakukan kerja marathon minimal kepada internal umatnya mengurai satu per satu persoalan yang pelik tersebut?

Ketika saya membaca Dukumen Keesaan Gereja (2009-2014) yang merupakan pembaharuan atau penyempurnaan dari Lima Dukumen Keesaan Gereja (LDKG) hasil keputusan SR DGI/PGI X di Ambon, poin keenam menegaskan tentang Menuju Kemandirian Teologi, Daya dan Dana (MKTDD), sepertinya kita hendak bertempur tapi kekuatan langkah kaki kita tertahan, karena lemahnya stamina yang kita miliki.

Dalam satu tarikan napas, ilustrasi kaki yang tertahan tersebut tidak dimaksud mematikan semangat (*passion*) untuk berbuat atau mengerdilkan cita-cita ideal yang melambung. Justru selaku warga gereja yang turut merasakan betapa beratnya pergumulan bergereja di Indonesia, kita tidak boleh lekas patah arang atau redup menyalakan spirit pelayanan.

Tokoh-tokoh elite gereja yang berkumpul di Gunung Sitoli, pasti merasakan kegetiran yang sama. Meskipun mereka sudah mengelaborasi persoalan-persoalan krusial bangsa ini, tetapi bila keterpaduan langkah mereka tidak solid (seperti tercermin pada sulitnya implementasi poin keempat DKG yakni Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM), maka percakapan yang sangat serius di ruang-ruang sidang menjadi *muspro* (sia-sia) belaka.

Aksi gereja keluar (*eksegese*) meminjam istilah Aune (1987) harus terlebih dulu diperkokoh dengan keutuhan komponen penggerak dari dalam (*eisegese*). Aksi sosial gereja adalah wilayah kerja pelayanan atau evangelisasi yang rentan dimanipulasi atau dipolitisasi. Memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam dengan niat kemanusiaan, tetapi salah lokasi itu saja bisa memunculkan persoalan. Tanpa keterpaduan yang saling menghormati diantara sesama anggota persekutuan, hasil aksi yang maksimal pasti tidak tercapai.

Gereja dalam tindakan keluar teritorialnya selain mengedepankan aspek kebermanfaatannya, tetap harus memperhatikan aspek kecermatan dan kewaspadaan lingkungan. Apalagi bila sudah menysar bidang-bidang seperti ketidakadilan, radikalisme dan lingkungan hidup yang kerap kali sarat kepentingan-kepentingan ekonomi politik. Itulah sebabnya, institusi gereja tidak boleh anti politik. Karena hampir semua sendi kehidupan sekarang ini tali temali dan bergerak di bawah kontrol politik.

Sebagai gerakan oikumenes, gereja juga tidak boleh terkooptasi oleh kekuatan politik tertentu sehingga menumpulkan daya kritisnya terhadap penguasa. Ketika setiap lima tahunan, PGI mengeluarkan surat gembala yang ditujukan kepada umatnya, arahnya juga jelas. Gereja tidak melakukan pemihakan kepada salah satu kekuatan politik tertentu. Netralitas sikap politik adalah refleksi institusi gereja yang punya integritas.

## **Penutup**

Sebagai salah satu kekuatan 'civil society', eksistensi PGI relatif diperhitungkan di Indonesia. Institusi ini murni adalah kekuatan pluralis yang dibentuk dari keprihatinan akan pentingnya membangun kesadaran berbangsa sebagai warga gereja. Maka siapapun yang terpilih dalam Sidang Raya PGI untuk meneruskan estafet kepemimpinan lima tahun kedepan (2014-2019) di Nias ini, jangan sekali-kali menggadaikan organisasi demi kepentingan jangka pendek. Gereja dipanggil untuk menyuarakan kebenaran bukan membenaran. Gereja harus berpikir untuk lintas generasi bukan hanya kepentingan saat ini.

**\*Gatut Priowidodo, Ph.D Ketua PKKP (Pusat Kajian Komunikasi Petra) dan Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya**